CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH WISATA DI KAWASAN CARITA, PANDEGLANG

Alfin Faturohman[1], Dede Ika Murofik[2]
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang
Email: alfinfaturohman15@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan tantangan utama, terutama di kawasan pesisir yang ramai dikunjungi wisatawan. Kawasan wisata Carita, Pandeglang, sering mengalami penumpukan sampah pasca musim liburan, yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kenyamanan pengunjung. Pemerintah daerah telah menerapkan sanksi administratif terhadap pengelolaan TPA Bangkonol yang tidak sesuai standar, namun efektivitasnya masih terbatas. Penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi administratif dalam pengelolaan sampah wisata di Carita dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif penting sebagai instrumen hukum, tetapi keberhasilannya bergantung pada pemantauan rutin, kapasitas pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta strategi pengelolaan berkelanjutan, termasuk sistem pemilahan sampah, edukasi pengunjung, dan peningkatan fasilitas TPA. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menciptakan kawasan wisata Carita yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: sampah wisata, sanksi administratif, pengelolaan berkelanjutan, Carita, Pandeglang

ABSTRACT

Waste management in tourist areas is a major challenge, especially in coastal areas frequented by tourists. The Carita tourist area in Pandeglang often experiences post-holiday waste accumulation, which impacts environmental quality and visitor comfort. The local government has implemented administrative sanctions for substandard management of the Bangkonol Landfill, but their effectiveness remains limited. This study analyzes the effectiveness of administrative sanctions in managing tourism waste in Carita using a descriptive qualitative approach through literature review and news analysis. The results indicate that administrative sanctions are important as a legal instrument, but their success depends on regular monitoring, management capacity, community participation, and sustainable management strategies, including waste sorting systems, visitor education, and

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: Desember 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

improvements to landfill facilities. This integrated approach is expected to create a clean, comfortable, and sustainable Carita tourist area.
Keywords: *tourism waste, administrative sanctions, sustainable management, Carita, Pandeglang*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kawasan wisata pesisir, seperti pantai-pantai di Indonesia, menghadapi tekanan lingkungan yang tinggi akibat meningkatnya jumlah pengunjung, kegiatan ekonomi lokal, dan limbah domestik yang dihasilkan. Masalah sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat berdampak negatif tidak hanya pada estetika kawasan wisata, tetapi juga pada kualitas ekosistem laut, kesehatan masyarakat, dan citra destinasi wisata itu sendiri. Dalam konteks global, pengelolaan sampah di kawasan wisata menjadi perhatian serius, karena banyak destinasi populer menghadapi permasalahan serupa, termasuk pencemaran pantai, pencemaran laut, dan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan pariwisata.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan baik dari pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, maupun masyarakat. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin dalam pengelolaan sampah dan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, efektivitas sanksi administratif seringkali dipengaruhi oleh kapasitas pengelola, sarana prasarana yang tersedia, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kawasan wisata Carita, yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah barat Pulau Jawa. Pantai Carita dikenal dengan panorama lautnya yang indah dan menjadi tujuan favorit wisatawan domestik, terutama pada musim liburan panjang. Namun, peningkatan jumlah pengunjung juga membawa tantangan signifikan terkait pengelolaan sampah. Setiap musim liburan, laporan media mengindikasikan adanya penumpukan sampah di sepanjang pantai, yang mengganggu kenyamanan pengunjung dan berdampak pada kualitas lingkungan (Inst-media.id, 2025). Fenomena ini menegaskan perlunya penegakan regulasi dan pengelolaan sampah yang lebih efektif di kawasan wisata Carita.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan peran sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan pengelolaan sampah di kawasan wisata. Agus Rahmanto et al. (2021) melakukan penelitian di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, dan menemukan bahwa penegakan hukum melalui regulasi daerah mampu meningkatkan kesadaran pengelola dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.[1] Studi tersebut menyoroti bahwa sanksi administratif, apabila diikuti pemantauan dan penegakan yang konsisten, dapat menjadi alat efektif dalam menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan nyaman.

Selain itu, Kusuma (2023) meneliti efektivitas pengelolaan sampah di kawasan wisata religi Banten Lama, yang juga menunjukkan bahwa regulasi daerah dapat menjadi mekanisme pendorong kepatuhan pengelola wisata. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, dan masyarakat setempat untuk menjamin efektivitas sanksi

[1] Agus Rahmanto, Wahyuni Krisna, and Widy Angga Windyantoto, 'Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan.', 1.4 (2021), pp. 11–22.

administratif. Hasil penelitian ini relevan untuk kondisi Carita, karena memperlihatkan bagaimana sanksi administratif dapat menjadi alat pengendalian sampah, tetapi tidak cukup tanpa dukungan sistem pengelolaan yang memadai.

Kajian internasional juga menekankan perlunya integrasi kebijakan, komunitas, dan penegakan hukum untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan wisata pesisir. Puluhulawa et al. (2025) mengemukakan konsep green criminology yang menekankan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sampah dan perlunya mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi administratif harus diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat serta edukasi lingkungan, sehingga tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan keberlanjutan jangka panjang.[2]

Selain itu, literatur mengenai strategi pengelolaan sampah di kawasan wisata seperti yang dikemukakan oleh Nasir (2024) dan Rustiana et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan memerlukan sistem pengumpulan, pemilahan, serta fasilitas TPA yang memadai. Strategi ini perlu disesuaikan dengan karakteristik kawasan wisata, volume sampah, dan perilaku wisatawan. Tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai, sanksi administratif semata tidak akan mampu menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh.[3]

Kondisi nyata di Carita menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik pengelolaan di lapangan. Walaupun pemerintah daerah telah menerima sanksi administratif dari KLH terkait pengelolaan TPA Bangkonol yang masih menggunakan metode open dumping (Banpos.co, 2025), penumpukan sampah di pantai pasca liburan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas pemerintah daerah, kesadaran masyarakat, serta intensitas pengawasan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi administratif dalam pengelolaan sampah wisata di kawasan Carita, Pandeglang, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efektif, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis berita terkini. Data dikumpulkan dari:

1. Studi akademik terkait pengelolaan sampah wisata dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk Surabaya, Banyuwangi, Garut, dan Gowa (Agus Rahmanto et al., 2021; Banjarnahor et al., 2025; Kirana et al., 2025; Kusuma, 2023; Nasir, 2024; Rustiana et al., 2024).
2. Laporan media online terkait kondisi sampah di kawasan wisata Pandeglang, khususnya Pantai Carita, dan sanksi administratif dari KLH kepada Pemkab Pandeglang (Inst-media.id, 2025; Banpos.co, 2025).

Analisis dilakukan dengan membandingkan teori efektivitas sanksi administratif dengan kondisi lapangan di Carita.

[2] Fenty Puluhulawa and others, 'Rethinking Coastal Waste: Integrating Green Criminology and Community Engagement for Sustainable Solutions', 14.1 (2025), pp. 69–85, doi:10.20961/yustisia.
[3] Erna Rustiana and others, 'Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut', 15.01 (2024), pp. 14–30.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Carita

Pantai Carita merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang dikenal dengan keindahan panorama laut dan pasirnya yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Setiap musim liburan, jumlah pengunjung meningkat signifikan, sehingga volume sampah yang dihasilkan juga meningkat drastis. Sampah wisata ini meliputi sampah plastik, kertas, sisa makanan, dan limbah rumah tangga lainnya. Laporan media menunjukkan bahwa pasca musim liburan, banyak titik di sepanjang pantai dipenuhi tumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik (Inst-media.id, 2025). Fenomena ini menimbulkan keresahan warga lokal dan wisatawan, karena sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu estetika dan kenyamanan, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan laut dan ekosistem pesisir.

Permasalahan sampah di Carita juga terkait dengan kapasitas pengelolaan yang terbatas. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah masih menggunakan metode tradisional, sementara fasilitas TPA yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menangani lonjakan sampah musiman. Kondisi ini diperparah oleh perilaku wisatawan yang kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya, meskipun sudah ada regulasi pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan nyata antara kebijakan formal dan praktik operasional di lapangan.

Selain itu, fenomena penumpukan sampah di Carita juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pengelola lokal dalam menjaga kebersihan kawasan wisata. Banyak lokasi yang seharusnya rutin dibersihkan sebelum, selama, dan setelah musim liburan ternyata kurang mendapat perhatian. Dalam beberapa kasus, warga setempat merasa terbebani karena harus membersihkan sampah yang dihasilkan oleh wisatawan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Kondisi nyata ini juga memunculkan dampak lingkungan yang serius. Sampah yang menumpuk di pantai dapat terbawa ke laut, mencemari ekosistem laut, mengganggu kehidupan biota laut, dan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, limbah plastik dan organik yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi sumber penyakit dan mencemari tanah di sekitar pantai. Dari sisi ekonomi, kondisi ini dapat menurunkan daya tarik wisata, sehingga berdampak pada penghasilan pengelola wisata dan perekonomian lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, penanganan sampah di Carita menjadi isu yang mendesak, yang memerlukan solusi terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejumlah langkah pengelolaan sudah diterapkan, seperti pengadaan tempat sampah di beberapa titik, pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan, dan edukasi singkat kepada wisatawan. Namun, laporan media dan studi sebelumnya menunjukkan bahwa langkah-langkah ini masih bersifat parsial dan belum cukup untuk mengatasi masalah secara keseluruhan (Inst-media.id, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk sanksi administratif bagi pengelola yang melanggar ketentuan, perlu diikuti dengan sistem monitoring yang konsisten, fasilitas pengelolaan yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dan wisatawan untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

2. Sanksi Administratif sebagai Penegakan Regulasi

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah. Di Indonesia, pemberian sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan daerah dan nasional sebagai mekanisme penegakan hukum yang tidak bersifat pidana, namun memiliki daya paksa untuk mendorong pihak yang melanggar melakukan perbaikan. Di Kabupaten Pandeglang, kasus pengelolaan TPA Bangkonol

menjadi contoh nyata penerapan sanksi administratif. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sanksi administratif kepada Pemkab Pandeglang karena TPA masih menggunakan metode open dumping, yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan sampah modern (Banpos.co, 2025).

Sanksi yang diberikan berupa peringatan resmi dan perintah untuk mengubah sistem pengelolaan sampah menjadi lebih tertib, termasuk penerapan sanitary landfill. Penerapan sanksi ini menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan pengelolaan sampah sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi administratif di sini berfungsi sebagai pendorong agar pemerintah daerah segera memperbaiki praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar. Dengan kata lain, sanksi ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga alat untuk memperbaiki sistem pengelolaan yang bermasalah.

Efektivitas sanksi administratif tidak hanya bergantung pada penerbitan surat peringatan atau instruksi, tetapi juga pada mekanisme monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang rutin dari instansi terkait menjadi kunci agar sanksi tersebut benar-benar diikuti oleh pemerintah daerah. Tanpa pemantauan yang konsisten, penerapan sanksi administratif dapat menjadi formalitas semata dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Dalam kasus Carita, meskipun Pemkab Pandeglang telah menerima sanksi, kondisi pantai pasca liburan masih menunjukkan penumpukan sampah, menandakan bahwa implementasi sanksi harus diimbangi dengan langkah-langkah operasional yang konkret.

Selain itu, sanksi administratif memiliki fungsi preventif bagi pihak lain yang terkait dengan pengelolaan sampah di kawasan wisata. Penerapan sanksi memberikan sinyal kepada pengelola, pengusaha wisata, dan masyarakat bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berakibat pada tindakan hukum formal. Dengan demikian, sanksi administratif juga berperan dalam membangun budaya kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan dan tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan kajian Agus Rahmanto et al. (2021) dan Kusuma (2023), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis sanksi administratif mampu meningkatkan disiplin pengelola dan kesadaran masyarakat di kawasan wisata.[4]

Namun, efektivitas sanksi administratif juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat dan wisatawan. Tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai, sanksi administratif akan sulit memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus diintegrasikan dengan strategi pengelolaan sampah yang lebih luas, termasuk peningkatan fasilitas TPA, program edukasi lingkungan, dan kolaborasi aktif dengan komunitas lokal. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjadikan kawasan wisata Carita lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

3. Efektivitas Sanksi

Efektivitas sanksi administratif dalam pengelolaan sampah wisata bergantung pada implementasi regulasi, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat. Di kawasan wisata Carita, sanksi administratif diharapkan menjadi alat untuk mendorong kepatuhan pengelola, meningkatkan disiplin, dan mengurangi penumpukan sampah. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh konteks operasional dan dukungan sarana prasarana.

1. Penelitian Agus Rahmanto et al. (2021) dan Kusuma (2023) menunjukkan bahwa sanksi administratif dapat efektif mendorong pengelola untuk mematuhi regulasi, terutama jika diikuti pemantauan rutin. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman formal, tetapi juga sebagai dorongan bagi pengelola untuk memperbaiki praktik pengelolaan sampah. Studi ini

[4] Kusuma, 'Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah'.

menekankan bahwa keberhasilan sanksi administratif terletak pada konsistensi penegakan dan evaluasi lapangan yang berkelanjutan.[5]

2. Banjarnahor et al. (2025) menyoroti keterbatasan sanksi administratif jika tidak disertai dukungan fasilitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat. Di beberapa lokasi, meski sanksi diterapkan, pengelola tetap kesulitan mengelola sampah karena terbatasnya tempat pembuangan dan infrastruktur pengolahan. Selain itu, kesadaran masyarakat dan wisatawan menjadi faktor penting; tanpa keterlibatan mereka, sanksi administratif sulit memberikan dampak nyata.
3. Kasus Carita menggambarkan keterbatasan efektivitas sanksi administratif di lapangan. Pantai Carita sering dipenuhi sampah pasca musim liburan, meskipun pemerintah daerah telah menerima sanksi administratif dari KLH terkait pengelolaan TPA Bangkonol (Banpos.co, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa volume sampah wisata melebihi kapasitas pengelolaan yang ada, dan perilaku wisatawan yang belum disiplin memperparah kondisi. Sanksi administratif perlu diimbangi strategi pengelolaan yang lebih sistematis agar efektif.
4. Puluhulawa et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi komunitas dan konsep green criminology untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurut studi ini, sanksi administratif perlu dilengkapi pendidikan lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan berbasis komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa sanksi administratif tidak hanya menjadi hukuman formal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku jangka panjang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.[6]

Secara keseluruhan, literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa sanksi administratif penting sebagai instrumen hukum, tetapi efektivitasnya bergantung pada pemantauan rutin, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan edukasi lingkungan. Pendekatan terpadu ini menjadi kunci untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

4. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan sampah di kawasan wisata tidak dapat bergantung semata-mata pada pemberian sanksi administratif. Efektivitas pengelolaan sampah akan lebih optimal jika disertai strategi berkelanjutan yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari pengaturan volume sampah hingga edukasi masyarakat dan pengunjung. Penelitian Nasir (2024) dan Rustiana et al. (2024) menekankan bahwa strategi pengelolaan yang terencana dapat mengurangi tekanan lingkungan, meningkatkan kualitas kawasan wisata, dan mendukung implementasi regulasi secara lebih efektif.

1. Pengaturan volume sampah melalui sistem pengumpulan dan pemilahan menjadi langkah utama dalam strategi berkelanjutan. Dengan memilah sampah berdasarkan jenis organik, anorganik, dan daur ulang pengelola dapat mengurangi beban TPA dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sistem pengumpulan yang teratur, baik harian maupun musiman, memastikan bahwa sampah tidak menumpuk, terutama pada musim liburan. Di kawasan Carita, sistem ini akan membantu mengendalikan volume sampah wisata yang kerap melebihi kapasitas pengelolaan, sehingga sanksi administratif yang diterapkan dapat lebih efektif karena ada mekanisme pengelolaan yang mendukung.
2. Edukasi pengunjung tentang kebersihan dan daur ulang merupakan langkah strategis untuk mengubah perilaku wisatawan. Pengunjung yang sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mendukung pemilahan limbah akan berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih efisien. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui papan informasi di pantai, sosialisasi melalui media digital, atau kampanye langsung oleh pengelola dan komunitas

[5] Kusuma, 'Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah'.
[6] Puluhulawa and others, 'Rethinking Coastal Waste: Integrating Green Criminology and Community Engagement for Sustainable Solutions'.

lokal. Edukasi ini juga memperkuat peran sanksi administratif, karena pengunjung dan masyarakat menjadi lebih sadar akan aturan yang berlaku.

3. Peningkatan kapasitas pengelolaan TPA dan fasilitas sanitasi merupakan langkah penting lainnya. Fasilitas TPA yang modern, seperti sanitary landfill atau sistem pengolahan sampah terintegrasi, dapat menampung sampah dalam jumlah besar secara aman dan ramah lingkungan. Selain itu, fasilitas sanitasi yang memadai di area wisata akan mendukung kenyamanan pengunjung sekaligus mencegah penumpukan sampah di lokasi publik. Di Carita, peningkatan kapasitas ini sangat relevan karena volume sampah musiman sering melebihi kapasitas pengelolaan saat ini, sehingga langkah ini menjadi pendukung efektifitas sanksi administratif.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan sampah berkelanjutan harus melibatkan integrasi sistem pengumpulan, edukasi pengunjung, dan peningkatan fasilitas pengelolaan. Pendekatan terpadu ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat efektivitas sanksi administratif, karena regulasi dapat berjalan bersamaan dengan tindakan nyata di lapangan. Dengan demikian, kawasan wisata Carita dapat menjadi lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dan kondisi lapangan di kawasan wisata Carita, Pandeglang, efektivitas sanksi administratif dalam pengelolaan sampah bergantung pada beberapa faktor kunci, yaitu pemantauan yang konsisten, kapasitas pengelolaan yang memadai, dukungan sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun sanksi administratif telah diterapkan, penumpukan sampah pasca musim liburan masih terjadi akibat volume sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan serta perilaku wisatawan yang belum disiplin. Hal ini menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat berdiri sendiri dan harus diintegrasikan dengan strategi pengelolaan yang lebih luas.

Selain itu, strategi pengelolaan berkelanjutan yang mencakup sistem pengumpulan dan pemilahan sampah, edukasi pengunjung, serta peningkatan kapasitas TPA dan fasilitas sanitasi terbukti penting untuk mendukung efektivitas sanksi administratif. Pendekatan terpadu ini memungkinkan regulasi berjalan selaras dengan tindakan nyata di lapangan, mendorong perubahan perilaku, dan menjaga kualitas lingkungan kawasan wisata. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Carita dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kenyamanan serta kepuasan wisatawan.

SARAN

1. Penguatan pemantauan dan evaluasi: Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan sampah di kawasan wisata, termasuk pemantauan pasca musim liburan untuk memastikan sanksi administratif diikuti tindakan nyata.
2. Peningkatan kapasitas fasilitas TPA: Modernisasi dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir serta fasilitas pengolahan sampah diperlukan untuk mengatasi lonjakan volume sampah wisatawan.
3. Sistem pengumpulan dan pemilahan sampah: Implementasi sistem pengumpulan yang teratur dan pemilahan berdasarkan jenis sampah (organik, anorganik, daur ulang) dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan.
4. Edukasi pengunjung dan masyarakat: Sosialisasi tentang kebersihan, pemilahan sampah, dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kampanye, papan informasi, dan media digital.

5. Kolaborasi dengan komunitas lokal: Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha wisata sangat penting untuk mendukung implementasi regulasi dan pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk keterlibatan komunitas dalam kegiatan bersih pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Banjarnahor, Jessica, Septi Maria Gultom, Lourensia Bravini Lahera, Michelle Belinda S, and Ribka Nainggolan, 'Efektivitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Sampah Sembarangan Di Kota Medan : Sebuah Studi Literatur', 2.1 (2025), pp. 28–44

Kusuma, Ahmad Eka, 'Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah', 1 (2023), pp. 253–62

Nasir, 'Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di Kawasan Wisata Danau Mawang, Kabupaten Gowa', 1, 2024, pp. 1–8

Puluhulawa, Fenty, Amanda Adelina Harun, Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, Sherly Joice Pangayow, and Karlin Z. Mamu, 'Rethinking Coastal Waste: Integrating Green Criminology and Community Engagement for Sustainable Solutions', 14.1 (2025), pp. 69–85, doi:10.20961/yustisia.

Rahmanto, Agus, Wahyuni Krisna, and Widy Angga Windyantoto, 'Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan.', 1.4 (2021), pp. 11–22

Rustiana, Erna, Pupung Pundenswari, Rosa Nur Oktavia, and Novi Agustina, 'Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut', 15.01 (2024), pp. 14–30

Inst-media.id (2025). Pantai di Pandeglang dipenuhi sampah usai liburan Lebaran, warga meradang.

Banpos.co (2025). Pengelolaan TPA Bangkonol buruk, Pemkab Pandeglang kena sanksi KLH.